

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
ABSTRAK.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
E. PENEGASAN ISTILAH.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. KAJIAN KONSEPTUAL.....	11
B. KAJIAN TEORI	13
C. PENELITIAN TERDAHULU	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. JENIS PENELITIAN	21
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	21
C. SUMBER BAHAN HUKUM	22
D. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	23
E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM	24
F. KEABSAHAN BAHAN HUKUM.....	24

BAB IV OPTIMALISASI PEMEKARAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.....	29
A. Konsep Optimalisasi Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	29
1. Landasan Konseptual Pemekaran Desa.....	29
2. Tujuan dan Manfaat Pemekaran Desa dalam Kerangka Pelayanan Publik.....	30
3. Kriteria dan Persyaratan Pemekaran Desa	32
B. Strategi Optimalisasi Pemekaran Desa untuk Peningkatan Pelayanan Publik	35
1. Perencanaan yang Komprehensif dan Partisipatif.....	35
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	37
3. Optimalisasi Sumber Daya dan Infrastruktur Pelayanan.....	40
4. Pengawasan dan Akuntabilitas Berbasis Partisipasi Masyarakat.....	41
C. Berdasarkan Teori yang Digunakan.....	44
1. Perspektif Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	44
2. Perspektif Teori Pelayanan Publik	45
3. Perspektif Teori <i>Good Governance</i>	47
D. Analisis Regulasi: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	48
1. Sinergi dan Komplementaritas Kedua Undang-Undang	48
2. Implikasi bagi Optimalisasi Pemekaran Desa	50
3. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi	52
BAB V PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM <i>FIQIH SIYASAH</i>	55
A. Perspektif Fiqih Siyasah	55
B. Pelayanan Publik dalam Teori Pemerintahan Islam Klasik.....	56
C. Konsep <i>Fiqih Siyasah</i> dalam Optimalisasi Pelayanan Publik	57
D. Konseptualisasi Pemekaran Daerah dalam Perspektif <i>Fiqih Siyasah</i>	63
E. Implikasi Normatif dan Kontributif terhadap Kajian <i>Fiqih Siyasah</i>	65
BAB VI PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
A. Buku.....	69

B. Jurnal Ilmiah	71
C. Tesis dan Disertasi	74
D. Peraturan Perundang-undangan.....	74
E. Sumber Internet.....	74
LAMPIRAN	75
BIODATA PENULIS.....	77